

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam praksis pendidikan di Indonesia, pelaksanaan kurikulum nasional sudah mengalami beberapa kali perubahan. Menurut Idi (2013: 17) terhitung sejak Indonesia merdeka kurikulum pertama adalah Rencana Pelajaran 1947, kemudian mengalami perubahan menjadi Rencana Pelajaran 1950, 1958, dan 1964. Setelah itu rencana pelajaran mulai berganti menjadi Kurikulum 1968. Kurikulum ini kemudian diubah lagi menjadi Kurikulum 1975, 1984, 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, dan terbaru Kurikulum 2013.

Namun dari sekian banyak perubahan kurikulum di Indonesia terutama sebelum era reformasi, pendekatan pengembangan kurikulum yang digunakan adalah pendekatan *top-down* atau *administrative* hal ini dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang cenderung tersentralisasi. Kurikulum yang dikembangkan dengan pendekatan *topdown* cenderung tidak menunjukkan kebutuhan riil masyarakat, melainkan berdasar pada pandangan dari sisi administrator semata. Hal ini menjadikan kurikulum belum memberikan ruang inovasi dan kreativitas bagi pendidik atau peserta didik dalam mengembangkan pembelajaran. Selain itu pengembangan kurikulum dengan pendekatan *top-down* cenderung lamban dalam merespons kebutuhan dan perubahan yang terjadi di masyarakat.

Berbeda dengan pendekatan *grass-root* dalam pengembangan kurikulum, yang melibatkan dan mendengarkan usulan masyarakat terutama para tenaga pendidik karena sebagai pihak yang bersinggungan langsung dan memahami potensi peserta didik serta lingkungannya. Menurut Sukmadinata (2000: 51) pengembangan kurikulum dengan pendekatan *grass-root* memungkinkan terjadinya kompetisi dalam peningkatan mutu dan sistem pendidikan yang pada gilirannya akan melahirkan pribadi-pribadi yang lebih mandiri dan kreatif. Hal ini perlu dijadikan suatu pertimbangan, mengingat tingkat kreativitas masyarakat Indonesia cenderung rendah. Berikut disajikan tingkat kreativitas masyarakat Indonesia dalam *Global Creativity Index* (Martin Prosperity Institute, 2015: 42).

THE GLOBAL CREATIVITY INDEX					
Rank	Country	Technology	Talent	Tolerance	Global Creativity Index
111	Pakistan	100	110	54	0.240
111	Kyrgyz Republic	100	74	94	0.240
113	Cambodia	87	118	78	0.213
114	Tajikistan	106	90	85	0.205
115	Indonesia	67	108	115	0.202
116	Albania	83	90	118	0.197
117	Uganda	—	108	109	0.197
118	Egypt	93	66	134	0.196
119	Niger	—	132	89	0.185
120	Morocco	78	98	120	0.178

Gambar 1. Indeks Kreativitas Global

Berdasarkan peringkat *Global Creativity Index* Indonesia menempati peringkat 115 dari 139 negara. Salah satu variabel yang digunakan dalam mengukur tingkat kreativitas adalah *creative class population*, yaitu porsi tenaga kerja atau produktivitas masyarakat di berbagai sektor yang memiliki kemampuan pemecahan masalah. Artinya tingkat kreativitas suatu negara bertumpu pada

kemampuan masyarakat dalam pemecahan masalah di berbagai sektor kehidupan. Maka selayaknya tingkat kreativitas masyarakat Indonesia dalam *Global Creativity Index* patut dijadikan bahan evaluasi dan motivasi sebagai upaya perbaikan kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui penataan sektor pendidikan yang tepat.

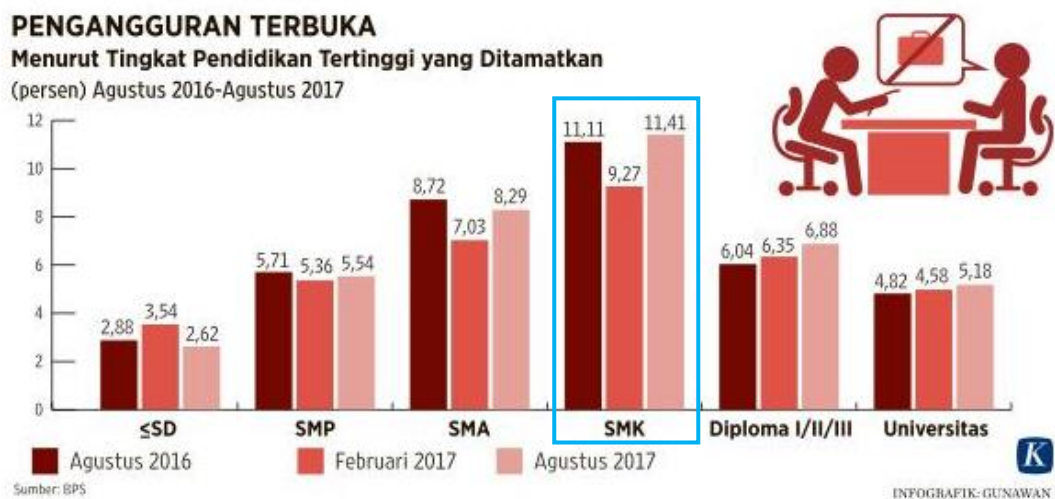
Pendidikan sebagai salah satu sektor pembangunan nasional dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang terdidik sehingga mampu bekerjasama dan proaktif menjawab tantangan zaman yang senantiasa berubah. Oleh karena itu, proses pendidikan harus diarahkan untuk memahami nilai-nilai kehidupan dan potensi di lingkungan peserta didik, belajar dari pengalaman, dan terlibat dalam kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, maka penyelenggaraan pendidikan haruslah mampu mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa di masa depan, yang menjadi faktor determinan bagi tumbuh kembangnya suatu bangsa. Hal tersebut didukung oleh pendapat Sariono (2013: 2) bahwa, keberadaan kurikulum sebagai salah satu komponen pendidikan berperan menyiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Kurikulum tidak cukup hanya mengarahkan peserta didik pada penguasaan materi pembelajaran, melainkan perlu dikembangkan dengan berorientasi pada kehidupan peserta didik dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Upaya menciptakan konsep pendidikan yang demikian, merupakan bagian untuk memenuhi hak pendidikan yang mengakomodir peserta didik untuk memahami nilai-nilai kehidupan, belajar dari pengalaman, dan terlibat dalam masyarakat. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 ayat (3) menyebutkan bahwa, “Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan; peningkatan iman dan taqwa, peningkatan akhlaq mulia, peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan agama”.

Mengingat sudah banyaknya perubahan kurikulum, tetapi konten kurikulum belum menunjukkan proporsi yang maksimal dalam upaya mengakomodir keragaman potensi dan lingkungan tempat peserta didik hidup dan berkembang. Menurut Basari (2004: 17) muatan kurikulum yang mempersiapkan peserta didik untuk mengembangkan potensi daerah belum berjalan secara baik di masing-masing tingkat satuan pendidikan. Hal ini ditandai dengan banyaknya muatan lokal yang seragam antara sekolah yang satu dengan yang lain, padahal sekolah-sekolah tersebut berada pada daerah dengan karakteristik yang berbeda. Sejalan dengan hal tersebut, dalam penelitian Rudi (2008: 6) mengungkapkan bahwa konten mata pelajaran muatan lokal belum menunjukkan adanya relevansi signifikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia industri dan potensi daerah atau lingkungan.

Demikian pula kurikulum yang berlaku belum mencerminkan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat terutama pada sektor industri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran Agustus 2017 sebanyak 7,04 juta jiwa atau 5,50 persen dari jumlah angkatan kerja. Ironisnya penyumbang tingginya angka pengangguran tersebut justru berlatar belakang pendidikan vokasi, baik sekolah menengah kejuruan maupun diploma I-III, membengkak dalam setahun terakhir menyentuh angka 11,41 persen (Kompas, 2017).



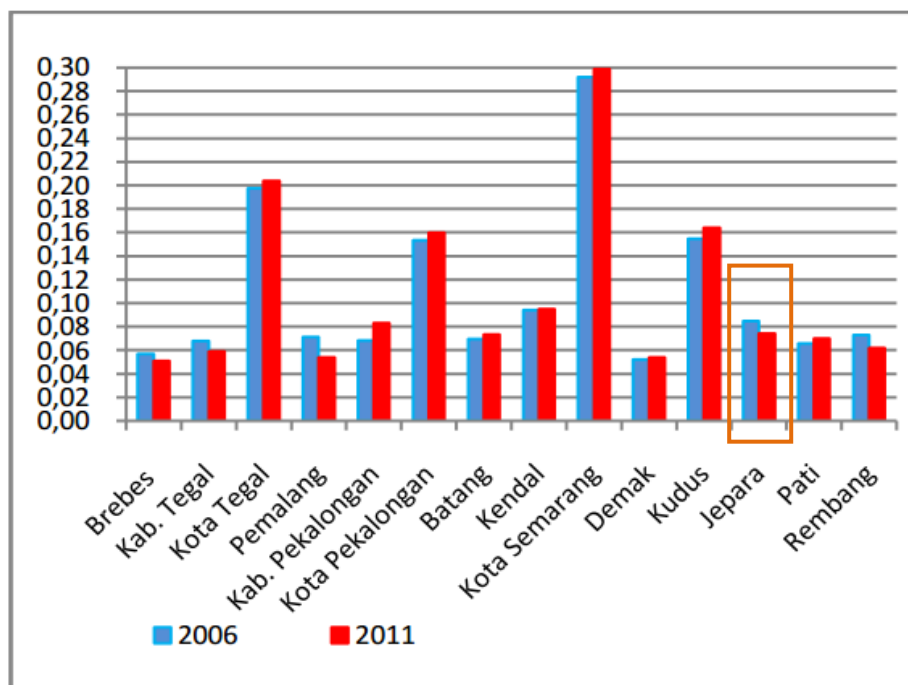
Gambar 2. Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan

Pada kebijakan penguatan wilayah kemaritiman yang termaktub dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, khususnya pada bidang pendidikan patut diapresiasi. Kebijakan penguatan wilayah kemaritiman tersebut meliputi; pembangunan pendidikan maritim, dan penguasaan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan. Hal ini menunjukkan adanya perhatian yang serius terhadap perencanaan, pengelolaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia berwawasan kemaritiman sekaligus pengembangan potensi sumber daya alam.

Merespons kebijakan tersebut, melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggagas perlunya suatu pengembangan dan penerapan kurikulum yang bertujuan untuk mengembangkan potensi kemaritiman. Sebagaimana yang dimuat oleh Junida (2017), upaya pengembangan dan penerapan kurikulum di bidang kemaritiman tersebut, meliputi kegiatan pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum pendidikan di bidang kemaritiman yang dilaksanakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai wahana mengembangkan pengetahuan, nilai (*value*), keterampilan, dan sikap yang mendukung pembangunan kemaritiman.

Selayaknya potensi kemaritiman di wilayah pesisir Indonesia merupakan suatu kawasan yang perlu dikembangkan salah satunya melalui sektor pendidikan bidang kemaritiman. Menurut Muflikhati, dkk (2013: 3) bahwa pandangan masyarakat pesisir terhadap pendidikan masih cenderung negatif. Masyarakat pesisir beranggapan bahwa sekolah itu tidak begitu penting. Anak-anak di sekolah justru belajar sesuatu hal yang tidak ada kaitannya langsung dengan kebutuhan atau kecakapan hidup yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut berbanding lurus dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa tingkat pendidikan masyarakat pesisir pantai utara Jawa khususnya Kabupaten Jepara pada tahun 2015 masih cukup rendah. Angka Partisipasi Murni pada Jenjang SMP/MTs hanya 83,26 persen, sedangkan pada Jenjang SMA/SMK/MA hanya 54,54 persen (Survey Sosial Ekonomi Nasional, 2015).

Sejalan dengan hal tersebut, Badiran (2010: 2) mengungkapkan adanya fakta bahwa mayoritas anak-anak pesisir yang mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atau pendidikan tinggi justru tidak ada kemauan untuk bekerja atau mengabdikan di wilayah pesisir dalam rangka mengembangkan potensi kemaritiman. Anak-anak pesisir justru lebih memilih untuk mencari pekerjaan di perkotaan. Hal ini didasari oleh pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari belum sesuai atau belum berkesinambungan dengan kebutuhan di lingkungan pesisir tempat mereka hidup dan berkembang. Artinya anak-anak pesisir belum memiliki pengetahuan atau keterampilan yang berkaitan dengan pengembangan potensi kemaritiman. Berikut disajikan data tingkat urbanisasi daerah pantai utara Jawa Tengah (Saputra & Rahayu, 2015: 746).



Gambar 3. Tingkat Urbanisasi Pantura Jawa Tengah

Nilai entropi tingkat urbanisasi daerah Pantura Jawa Tengah mencapai rata-rata 0,107. Sedangkan pada tingkat urbanisasi di wilayah Kabupaten Jepara hampir mendekati rata-rata yaitu diangka 0,901. Selain tingginya angka urbanisasi juga terjadi fenomena pergeseran dari urbanisasi sosial menjadi urbanisasi ekonomi. Hal ini menunjukkan tingkat urbanisasi masyarakat Jepara tergolong cukup tinggi.

Dengan demikian, peneliti berpandangan bahwa perlu dikembangkan suatu desain kurikulum yang relevan dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat maritim, kepentingan nasional, serta dunia industri. Dalam upaya pengembangan desain kurikulum, harus memperhatikan tujuan pendidikan nasional, tahap perkembangan peserta didik, kesesuaian dengan lingkungan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan. Oleh karena itu penting untuk dilakukan penelitian pengembangan desain kurikulum bidang kemaritiman pada kawasan pesisir khususnya di wilayah Kabupaten Jepara.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut;

1. Konten kurikulum belum mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, kepentingan potensi kewilayahan, dan dunia industri.
2. Kemampuan pemecahan masalah dan tingkat kreativitas masyarakat masih menunjukkan tingkat yang rendah.



3. Kurikulum pendidikan menengah belum mengakomodir keragaman potensi peserta didik dan upaya pengembangan potensi kewilayahan atau lingkungan.
4. Kurikulum yang berlaku belum mencerminkan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat terutama pada sektor industri.
5. Sistem pendidikan nasional belum memberikan hak pendidikan yang mengakomodir peserta didik untuk memahami nilai-nilai kehidupan, belajar dari pengalaman, dan terlibat dalam masyarakat.
6. Tingkat pendidikan masyarakat pesisir pantai utara Jawa khususnya Kabupaten Jepara tahun 2015 masih cukup rendah.
7. Anak-anak pesisir belum memperoleh bekal kecakapan hidup melalui ketersediaan layanan pendidikan yang relevan dengan lingkungan pesisir.

### **C. Pembatasan Masalah**

Mengacu pada berbagai identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, diperoleh gambaran dimensi permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari adanya keterbatasan pada peneliti, maka peneliti memandang perlu untuk memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus.

Pada penelitian ini, peneliti membatasi pada persoalan potret pendidikan masyarakat maritim dan desain kurikulum bidang kemaritiman di wilayah pesisir pantai Jepara. Potret pendidikan masyarakat maritim digunakan sebagai penelitian pendahuluan, karena hal ini merupakan bagian pijakan penting dalam menyusun desain kurikulum bidang kemaritiman.

Dengan memahami potret pendidikan masyarakat maritim secara mendalam dan komprehensif, maka pengembangan desain kurikulum diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat maritim. Selain itu, desain kurikulum bidang kemaritiman diarahkan untuk mengakomodir kepentingan peserta didik dalam memahami nilai-nilai kehidupan, membekali keterampilan hidup, memfasilitasi belajar dari pengalaman, dan terlibat dalam realitas masyarakat.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berpijak pada uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua hal, yaitu;

1. Bagaimana potret atau kondisi pendidikan masyarakat maritim di wilayah pesisir pantai Jepara?
2. Bagaimana desain kurikulum bidang kemaritiman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat maritim di wilayah pesisir pantai Jepara?

#### **E. Tujuan Pengembangan**

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah di atas, penelitian pengembangan desain kurikulum bidang kemaritiman ini bertujuan untuk;

1. Mendeskripsikan potret atau kondisi pendidikan masyarakat maritim di wilayah pesisir pantai Jepara.
2. Merumuskan desain kurikulum bidang kemaritiman yang relevan dengan kebutuhan masyarakat maritim di wilayah pesisir pantai Jepara.

## **F. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan**

Produk yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebuah desain kurikulum bidang kemaritiman yang relevan dengan kebutuhan masyarakat maritim di wilayah pesisir pantai Jepara. Desain kurikulum yang dikembangkan, diarahkan sebagai alternatif kurikulum pendidikan bidang kemaritiman pada jenjang pendidikan menengah terutama pada jalur pendidikan vokasi.

Cakupan desain kurikulum bidang kemaritiman ini terdiri atas; (1) tujuan dan sasaran kurikulum bidang kemaritiman; (2) pengalaman belajar; (3) konten kurikulum bidang kemaritiman; (4) organisasi dan integrasi pengalaman belajar dengan konten kurikulum; dan (7) evaluasi.

## **G. Manfaat Pengembangan**

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi memberikan pandangan kepada akademisi, praktisi maupun pengambil kebijakan pada sektor pendidikan mengenai pengembangan kurikulum berbasis kewilayahan atau lingkungan, khususnya pada bidang kemaritiman. Selain itu hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam menambah ataupun melengkapi teori ilmu pendidikan, terutama dalam teori dan praktik pengembangan kurikulum pendidikan.

Sedangkan, secara praktik capaian penelitian ini adalah berupa artikel ilmiah dan produk berupa desain kurikulum bidang kemaritiman. Desain kurikulum ini dapat digunakan sebagai pedoman atau rujukan dalam pengambilan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama pada kawasan

pesisir. Selain itu, desain kurikulum bidang kemaritiman ini dapat diterapkan sebagai kurikulum alternatif pada jenjang pendidikan menengah terutama pada jalur pendidikan vokasi. Melalui desain kurikulum bidang kemaritiman ini, menjadikan langkah awal dalam penguatan dan pembangunan sumber daya manusia serta pengembangan potensi lingkungan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat maritim, mengingat wilayah Indonesia sebagian besar merupakan wilayah lautan.

#### **H. Asumsi Pengembangan**

Dalam penelitian ini, desain kurikulum bidang kemaritiman dengan studi pada masyarakat maritim di pesisir pantai Jepara, dikembangkan dengan adanya beberapa asumsi, yaitu;

1. Pengembangan kurikulum pendidikan harus relevan dengan kepentingan peserta didik, kebutuhan masyarakat, tantangan sektor industri, kepentingan nasional dan serasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.
2. Kurikulum harus mampu sebagai instrumen pengembangan potensi lingkungan atau kewilayahan. Sehingga pelaksanaan kurikulum pendidikan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan dan kemajuan suatu lingkungan atau wilayah.

3. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik yang mencakup peningkatan iman dan taqwa, akhlaq mulia, potensi kecerdasan, minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan agama.
4. Upaya pengembangan kurikulum kemaritiman harus memperhatikan dan mengutamakan prinsip pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik dalam rangka mengembangkan potensi kemaritiman.